



Minim Murid Meski Sarpras Memadai

■ Perjuangan SD Negeri di Kota Yogya Penuhi Kuota Rombongan Belajar

YOGYA, TRIBUN - Fenomena kekurangan murid baru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Yogyakarta kembali menjadi sorotan pada tahun ajaran baru ini. Sejumlah sekolah terpantau harus memutar otak, menata strategi baru, dan bekerja keras akibat jumlah pendaftar yang jauh dari kuota maksimal rombongan belajar (rombel).

Kondisi tersebut di antaranya dialami oleh SD Negeri Kintelan 2 Yogyakarta yang hanya berhasil menjangkit enam siswa baru untuk kelas 1. Angka ini sebenarnya sudah mengalami peningkatan 100 persen jika dibandingkan tahun lalu yang hanya tiga siswa baru.

Kepala SD Negeri Kintelan 2 Yogyakarta, Kuswanto, mengungkapkan, secara kualitas dan fasilitas sarana prasarana (sarpras), sekolah besutannya sejatinya tidak kalah saing. Oleh sebab itu, pihaknya kini fokus menata strategi promosi yang lebih

luas guna menunjukkan daya tarik sekolah ke luar wilayah perkampungan setempat.

"Dari segi prestasi, lulusan kemarin sebagian besar diterima di SMP Negeri dan ada yang meraih nilai TKA mencapai 90," ungkapnya. Selasa (14/7).

Kuswanto menegaskan, minimnya murid bukan disebabkan oleh buruknya fasilitas yang disediakan di sekolah yang terletak di tengah perkampungan penduduk ini. Menurutnya, minimnya jumlah lulusan Taman Kanak-kanak (TK) di kawasan setempat, ditambah persaingan antarsekolah dasar negeri yang berjelut di wilayah yang sama, menjadi kendala utama.

"Memang karena letak kami di dalam perkampungan. Saya melihat lulusan TK di kampung sekitar sini cuma sebatas itu saja. Kemudian, di satu kelurahan ini ada tiga SD negeri, kondisinya rata-rata juga sama," ucapnya.

Untuk mendongkrak daya pikat bagi calon siswa di tahun-tahun mendatang, SDN Kintelan 2 kini mulai menggenjot berbagai program non-akademik. Variasi kegiatan ekstrakurikuler ditambah, mulai dari karate, futsal, badminton, hingga Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dibangun pula pangung kreativitas dan bakat siswa di halaman sekolah.

"Kami ingin membuktikan, bahwa dengan jumlah siswa yang efisien ini, bimbingan dan perhatian kepada anak justru bisa jauh lebih maksimal," imbuh Kuswanto.

Terbentasi standar
Kondisi serupa juga terjadi di SD Negeri Pingit, Kemantren Tegalejo, yang hanya mendapat 11 siswa

baru pada tahun ajaran kali ini, dari standar kuota maksimal 28 siswa per kelas. Pitt Kepala SD Negeri Pingit, Sri Puji Hariyanti, mengakui tren minimnya jumlah siswa ini menjadi beban tersendiri, meski tidak menyurutkan langkahnya untuk terus berinovasi, termasuk di sektor fisik.

Setelah berhasil merampungkan rehabilitasi berat pada bagian atap sekolah, pihak sekolah kini tengah mengajukan perbaikan kusen hingga fasilitas kamar mandi. Kemudian, untuk mendukung literasi digital serta pelaksanaan ANBK, ketersediaan perangkat laptop dan Chromebook di sekolah pun dipastikan sudah mencukupi.

Meski sarpras sudah memadai, minimnya dana bantuan operasional yang berbasis jumlah siswa membuat para guru di SDN Pingit kerap berinisiatif iuran mandiri demi mencukupi kebutuhan kegiatan siswa yang belum tercakup bantuan atau anggaran pemerintah. "Itu yang jadi penguat kami untuk terus bertahan," terangnya.

Ia berharap pemerintah kota maupun pembuat kebijakan dapat meninjau ulang aturan terkait standar minimal rombel di Kota Yogyakarta agar beban sekolah negeri tidak semakin berat. Yanti menyebut, untuk memenuhi 28 siswa dalam satu rombongan belajar tergolong sangat berat, di tengah kemerosotan tingkat populasi anak usia sekolah di Kota Pelajar.

"Kalau bisa, diturunkanlah standarnya, ya, dari 28 jadi 20 siswa. Karena untuk mencapai 20 anak saja, kami di bawah sudah harus berjuang dan berusaha dengan segala macam cara," pungkasnya. (aka)



PENGENALAN - Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) untuk siswa baru di SD Negeri Pingit Yogyakarta, Selasa (14/7).

Tidak Ada Regrouping

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta sama sekali tak melirik opsi pengelompokan atau regrouping untuk mengurai fenomena krisis siswa baru di jenjang sekolah dasar (SD) negeri. Wali Kota Yogyakarta, Hastu Wardoyo, mengungkapkan, ketimpangan animo masyarakat pada jenjang SD dan SMP negeri menunjukkan adanya sumbatan kualitas tata kelola di level pendidikan dasar. Jika SMP negeri selalu diserbu pendaftar hingga melebihi kuota, kondisi sebaliknya justru melanda sejumlah sekolah dasar yang terseok-seok menggaet murid anyar.

"Minat masyarakat untuk masuk SD negeri kurang, tapi minat masyarakat untuk masuk SMP negeri bagus. Nah, itu menunjukkan manajemen SMP bagus dan banyak diminati masyarakat. Berarti manajemen SD masih kurang bagus, harus ditingkatkan lagi," tandasnya, Selasa (14/7).

Mantan Kepala BKKBN RI tersebut menekankan supaya para kepala sekolah

dan guru SD negeri tidak berpasrah diri dengan kondisi minimnya murid ini. Hastu menilai, menutup sekolah lewat metode regrouping bukanlah solusi yang bijak di tengah tingginya beban biaya pendidikan yang kerap dikeluhkan masyarakat miskin.

"Saya sering sampaikan ke guru-guru, kepala sekolah, ayolah kita berkompetisi untuk menjadi SD yang baik. Jadi, semangatnya jangan regrouping," tegasnya. Wali Kota menegaskan, skema regrouping berbanding terbalik dengan semangat untuk menghadirkan sebanyak mungkin sekolah gratis. Terlebih, ia menyadari, dengan problem keterbatasan lahan, Kota Yogyakarta sejauh ini belum mampu merealisasikan Sekolah Rakyat selaras arahan Presiden.

"Waduh, sedih kalau semangat regrouping, menutup sekolah itu. Karena kenyataannya banyak orang tua yang mengeluh membayar mahal sekolah. Kita ingin sediakan sebanyak-banyaknya sekolah gra-

tis," ucapnya. Berdasarkan pemetaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, tingkat keterisian bangku di seluruh SD negeri se-Kota Yogyakarta sebenarnya sudah menyentuh angka 79 persen dari total sekitar 3.700 daya tampung tersedia. Dalam pemetaan tersebut, ditemukan pula fakta mengenai penyusutan populasi anak usia 7 tahun yang pada tahun ajaran baru ini berada di kisaran 4.300-an anak.

Kondisi itu dipengaruhi langsung oleh faktor demografi ekstrem, yakni angka fertilitas (Total Fertility Rate/TFR) Kota Yogyakarta yang kini berada di angka 1,66, selisih sekitar 700 anak dari estimasi total populasi usia 7 tahun disinyalir akibat pergeseran domisili orang tua ke wilayah penyangga seperti Sleman dan Bantul, meski secara administrasi kependudukan masih tercatat sebagai warga kota. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005